

## VIII. KINERJA PELAKSANAAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN WONOSOBO

### A. TEMUAN KONDISI RIIL LAPANGAN

Hasil temuan dari Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun 2004 yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Wonosobo:

#### 1. Rencana Pengembangan Komoditas Buah-buahan Eksotis Tropis

Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan komoditas unggulannya, diarahkan pada pengembangan buah-buahan tropis dengan jenis seperti salak, langsep, durian, pisang, manggis, nanas dan pepaya. Lokasi budidayanya adalah di seluruh Kawasan Agropolitan Rojonoto (KAR) dengan prioritas kawasan *hinterland* KAR yang ada di Kecamatan Kaliwiro (pisang/nanas), Sukoharjo (salak), Leksono (langsep/manggis), dan Selomerto (durian).

Untuk mendukung upaya pengembangan buah-buahan tropis tersebut maka juga akan dikembangkan agroindustri pendukung, berupa *home industry* sale pisang, manisan salak, selai nanas dan dodol durian. Juga akan dikembangkan agroindustri menengah keripik salak, serta agroindustri besar tepung pisang. Lokasi pengembangan pada tingkat *home industry* direncanakan di seluruh KAR dengan prioritas pada daerah *hinterland* yang termasuk dalam Kecamatan Kaliwiro, Sukoharjo, Leksono, dan Selomerto. Pada skala agroindustri menengah dibangun pabrik *juice* dan *coctail* di Kota Tani Utama Sawangan, Kota Tani Tlogo dan di Desa Krasak Kecamatan Selomerto.

Pada tahun pertama, kedua dan ketiga prioritas pengembangan komoditas buah-buahan dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi terutama dilakukan pada jenis salak, durian, langsep, pepaya dan pisang unggul dengan introduksi sistem perbanyakan yang sesuai kebutuhan dan modern teknologinya. Ekstensifikasi dilakukan pada daerah – daerah penyangga KAR. Prioritas pengembangan agribisnis buah-buahan pada tahun keempat lebih diarahkan untuk penanganan proses pasca panen agar kualitas manisan, *juice* atau *coctail* meningkat dan seragam. Pada tahun ke lima dilakukan konsolidasi koperasi/grup swasta dalam masyarakat agribisnis KAR untuk mendirikan perusahaan manisan buah terintegrasi vertikal dan PERUSDA *juice* dan *coctail* buah-buahan eksotis tropis. Pada tahun-tahun selanjutnya pengembangan aspek pemasaran dan distribusi perlu direncanakan dengan portofolio produk dalam perluasan pasar.

Pembiayaan program-program pengembangan komoditas buah-buahan di KAR dipilah menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan pemasaran. Pembiayaan dalam tahap peningkatan produksi dilakukan baik pada sub sistem hulu maupun sub sistem budidaya. Pembiayaan pada sub sistem hulu ditekankan pada penyediaan bibit tanaman buah-buahan dalam ujud pembuatan kebun bibit KAR. Pembiayaan pada sub sistem budidaya berujud pembiayaan untuk demplot-penyuluhan-pelatihan, perbanyakan tanaman serta pengadaan sarana produksi yang dibutuhkan aktual oleh para petani. Pembiayaan pada tahap peningkatan nilai tambah dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk *home industry* pemrosesan manisan buah-buahan serta mendorong bertambahnya agroindustri kecil dan menengah *juice* serta *coctail*. Pembiayaan pemasaran dibutuhkan untuk pembangunan fisik pasar pengumpul, tempat pelelangan buah serta pembiayaan

penyuluhan – temu usaha – divisi marketing keluar daerah termasuk luar negeri.

Peran serta masyarakat KAR dalam pengembangan agribisnis buah-buahan dilakukan secara perorangan atau melalui organisasi seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pengembangan *home industry* manisan buah, Asosiasi Pengusaha Manisan Buah (APMB) dalam pemasaran, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam sosio-ekonomi-politik dan Koperasi Petani Buah-buahan (KOPBUAH) merupakan lembaga fasilitasi kelompok untuk pengadaan modal kerja produksi dan pemasaran hasil produksi.

Pengembangan KAR akan dikembangkan dengan berorientasi pada pengembangan kapital sosial, untuk itu kemitraan yang direncanakan adalah pola kemitraan terintegrasi vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan grup swasta setempat, pemilikan grup/koperasi petani buah dan pengrajin manisan di KAR dan pemilikan grup/koperasi petani buah serta pengrajin manisan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan investor yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk *juice* dan *coctail* buah dalam kaleng (*Base on Market*).

## **2. Rencana Pengembangan Sektor Tanaman Pangan**

Selain tanaman buah-buahan tropis, juga akan dikembangkan tanaman pangan. Jenis tanaman pangan yang dikembangkan di KAR adalah padi, jagung, kacang tanah dan ketela pohon. Budidaya tanaman pangan dapat mencakup lahan yang luas, baik di sawah maupun tegalan atau sawah tadah hujan. Pola tanam dapat monokultur maupun polikultur (diversikatif). Dinamika intensifikasi dan ekstensifikasi tergantung dari perkembangan nilai ekonomi tanaman pangan, oleh karena itu upaya peningkatan nilai tambah melalui

agroindustri mutlak perlu dilakukan, baik pada skala *home industry* di daerah *hinterland* maupun menengah/besar di Kota Tani maupun Kota Tani Utama.

Untuk mendukung upaya pengembangan tanaman pangan tersebut maka juga akan dikembangkan agroindustri pendukung. *Home industry*/agroindustri menengah berupa nasi jagung instan, tiwul instan, beras dalam kemasan plastik dan keripik singkong. Pada skala *home industry* direncanakan di semua lokasi *hinterland* KAR. Sedangkan lokasi yang tepat bagi agroindustri tanaman pangan (agroindustri menengah) direncanakan di Kota Tani Tlogo dan Selomerto. Namun demikian perlu dikemukakan agroindustri kecil yang berkenaan dengan bahan baku tanaman pangan dapat dikembangkan pada area *existing* (di desa-desa *hinterland*).

Pembiayaan program-program pengembangan tanaman pangan di KAR dibagi menjadi tiga tahap yaitu : peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan pemasaran. Pembiayaan dalam tahap peningkatan produksi dilakukan baik pada sub sistem hulu maupun sub sistem budidaya. Pembiayaan pada sub sistem hulu ditekankan pada penyediaan bibit tanaman pangan dalam ujud penangkaran bibit unggul sertifikasi. Pembiayaan pada sub sistem budidaya berujud pembiayaan untuk demplot-penyuluhan-pelatihan, serta pengadaan sarana produksi yang dibutuhkan aktual oleh para petani. Pembiayaan pada tahap peningkatan nilai tambah dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk *home industry* serta mendorong bertambahnya agroindustri kecil dan menengah tanaman pangan. Pembiayaan berkenaan dengan alat dan mesin pengolahan hasil perlu direncanakan secara matang pada setiap tahun indikasi program. Pembiayaan pemasaran dibutuhkan untuk pembangunan sarana fisik pasar pengumpul, lumbung desa, stasiun atau sub terminal agribisnis,

pembiayaan penyuluhan – temu usaha – divisi marketing keluar daerah termasuk ke luar negeri.

Sumber biaya yang dapat digali untuk pembiayaan pengembangan tanaman pangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Sumber pembiayaan juga dapat diperoleh dari masyarakat agribisnis Kabupaten Wonosobo serta investor.

Peran serta masyarakat KAR dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air, Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pengembangan *home industry* tanaman pangan; Asosiasi Pengrajin Tahu dan Tempe (APTT) dalam pemasaran; Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam sosio – ekonomi – politik dan Koperasi Petani Tahu dan Tempe.

Pengembangan KAR yang berorientasi pada pengembangan kapital sosial, untuk itu kemitraan yang direncanakan adalah pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan grup swasta setempat, pemilikan grup/koperasi petani tanaman pangan (KOPTAP) di KAR dan pemilikan grup/KOPTAP bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan investor yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk.

### **3. Rencana Pengembangan Komoditas Kambing**

Untuk sektor peternakan, maka akan dikembangkan ternak kambing. Jenis kambing dan domba di Kabupaten Wonosobo sangat spesifik dengan kualitas daging yang baik serta kulit yang mempunyai pasar luas bahkan ekspor. Jenis kambing keturunan Etawa perlu dipertahankan secara genetis bahkan dilestarikan. Lokasi budidaya ternak kambing dikembangkan di beberapa desa *hinterland*, yaitu :

Desa Depok, Margolangu, Bendungan, Kalimalang dan Selomanik. Di Desa Selomanik dibangun *ranch* bakalan kambing yang berfungsi meningkatkan genitas dan kesehatan kambing. Pengembangan hijauan pakan kambing dilakukan di bawah tegakan hutan negara dan hutan rakyat. Di Desa *hinterland* tersebut tersedia hutan negara yang paling luas di Kecamatan Kaliwiro.

Agroindustri peternakan kambing yang dikembangkan meliputi daging dalam kemasan, industri penyamakan kulit serta industri kerajinan dari kulit kambing. Lokasi agroindustri di Kota Tani Kaliwiro. Prioritas pengembangan dilakukan pada pengadaan dan perbanyakan bakalan kambing (Selomanik) serta pengadaan sapronak (sarana produksi ternak). Pengembangan kandang bersama serta pembuatan pupuk kandang untuk pemupukan organik dilakukan dalam group/koperasi peternak kambing dan domba.

Pembiayaan program-program pengembangan kambing dan domba di KAR dibagi menjadi tiga tahap yaitu : peningkatan kuantitas dan kualitas bakalan, peningkatan nilai tambah dan pemasaran. Pembiayaan dalam tahap peningkatan kuantitas dan kualitas bakalan dilakukan baik pada sub sistem hulu maupun sub sistem budidaya. Pembiayaan pada sub sistem hulu ditekankan pada penyediaan bibit kambing dalam ujud penangkaran bibit unggul lokal. Pembiayaan pada sub sistem budidaya berujud pembiayaan untuk demplot-penyuluhan-pelatihan, serta pengadaan sarana produksi yang dibutuhkan aktual oleh para peternak. Pembiayaan pada tahap peningkatan nilai tambah dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk *home industry* serta mendorong bertambahnya agroindustri kecil dan menengah pengolahan daging dan kulit kambing serta domba. Pembiayaan berkenaan dengan rumah potong, alat dan mesin pengolahan hasil perlu direncanakan secara matang. Pembiayaan pemasaran dibutuhkan untuk pembangunan sarana fisik pasar

kambing di Kota Tani Kaliwiro, rumah potong hewan, pembiayaan penyuluhan – temu usaha – divisi marketing keluar daerah termasuk ke luar negeri. Sumber biaya yang dapat digali untuk pembiayaan pengembangan tanaman pangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Sumber pembiayaan juga dapat diperoleh dari masyarakat agribisnis Kabupaten Wonosobo serta investor.

Peran serta masyarakat KAR dalam pengembangan agribisnis ternak kambing dapat dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti Perkumpulan Peternak Ruminansia Kambing. Pengembangan KAR yang berorientasi pada pengembangan kapital sosial, untuk itu kemitraan yang direncanakan adalah pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan grup swasta setempat, pemilikan grup/koperasi Peternak Ruminansia Kambing (KOPRUMBING) di KAR dan pemilikan grup/ (KOPRUMBING) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan investor yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk daging maupun kulit.

#### **4. Rencana Pengembangan Komoditas Kayu Rimba**

Untuk tanaman keras, akan dikembangkan komoditas kayu rimba. Jenis kayu yang dikembangkan adalah kayu dengan orientasi untuk mengisi kebutuhan agroindustri pulp, seperti jenis *eucalyptus*, akasia dan pinus. Lokasi budidaya kayu rimba dikembangkan di beberapa desa kawasan *hinterland*, yaitu : Desa Depok, Margolangu, Bendungan, Kalimalang dan Selomanik. Pengembangan budidaya kayu rimba ini dapat dijadikan tegakan untuk pengembangan budidaya hijauan pakan kambing.

Agroindustri kayu rimba yang dikembangkan meliputi : industri pulp, industri kayu untuk perumahan serta industri kayu balen di lokasi agroindustri di Kota Tani Kaliwiro. Prioritas pengembangan dilakukan pada penyediaan serta perbanyak bibit tanaman yang cepat tumbuh. Pembuatan kebun bibit dapat dilakukan untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat dalam memperoleh bibit tanaman kayu rimba.

Sumber biaya yang dapat digali untuk pembiayaan pengembangan tanaman pangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Sumber pembiayaan juga dapat diperoleh dari Asosiasi Perakayuan Indonesia. Peran serta masyarakat KAR dalam pengembangan agrobisnis kayu rimba dapat dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti Perkumpulan Masyarakat Perakayuan.

Sebagaimana orientasi agribisnis komoditas lain, orientasi pengembangan kayu rimba terletak pada pengembangan kapital sosial, untuk itu kemitraan yang direncanakan adalah pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan grup swasta setempat, pemilikan grup bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan investor yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk pulp maupun kayu balen.

Rencana pengembangan agrobisnis kayu rimba pada kawasan agropolitan Rojonoto diarahkan untuk dijadikan industri unggulan. Selain sangat potensial meraup devisa cukup besar, agribisnis pulp dan kertas juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan banyak sektor ekonomi di dalam negeri. Kayu rimba sebagai agribisnis yang relatif baru di Indonesia, serta agribisnis pulp dan kertas, memang memiliki ketergantungan yang masih tinggi terhadap kayu hutan alam (*forest*



base). Dimasa depan agribisnis kayu rimba (pulp dan kertas) di Rojonoto harus memutus ketergantungan pada kayu alam melalui pengembangan perkebunan tanaman kayu (timber plantation). Pengembangan perkebunan kayu ini perlu diperluas dan dikembangkan terus dan didukung *riset* serta *development* (R&D) seperti pemuliaan tanaman kayu sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar volume tiap hektar dan siklus pemanenan yang makin pendek.

Untuk mendukung pengembangan timber *plantation* ini perlu sekali mengikutsertakan masyarakat lokal dengan mengembangkan pasar kayu tegakan (*stumpage market*). Hasilnya jual beli kayu tegakan (*spot future market*) dapat dilakukan tanpa harus disertai jual beli lahan. Dengan berkembangnya pasar kayu tegakan, rakyat lokal dapat mengembangkan perkebunan kayu skala kecil-menengah yang diberdayakan oleh perusahaan pulp dan kertas.

Pengembangan pasar kayu tegakan di tingkat lokal yang sinergis dengan kepentingan rakyat dan perusahaan pengolah pulp dan kertas, dapat menjadi salah satu upaya mengatasi masalah pemilikan lahan termasuk hak-hak ulayat rakyat lokal. Pengembangan budidaya tanaman kayu tegakan selain dapat menjamin ketersediaan bahan baku industri pulp, perlu juga dilakukan pengembangan teknologi pulping terus menerus (*strive for cleaner technologies*) guna meminimumkan polutan yang banyak diprotes masyarakat. Membangun industri pulp yang ramah lingkungan (*green industry*) perlu menjadi komitmen seluruh pelaku agribisnis pulp dan kertas.

Membangun agribisnis yang memiliki daya saing, ramah lingkungan serta menjadi warga komunitas agribisnis yang baik (*to be good corporate citizen*) merupakan arah pengembangan agribisnis pulp dan kertas Rojonoto ke depan.



Gapura Kawasan Agropolitan Rojoto



STA Sempol yang terbengkelai



Salah satu sudutnya dimanfaatkan untuk berjualan makanan dan tambal ban



Los pasar yang kosong



Dimanfaatkan untuk menyimpan kayu

1956



Terminal Sawangan yang direncanakan sebagai STA Pedagang Besar



Suasana di dalam Terminal Sawangan

## 5. Persepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan dari SKPD Pengelola

Dari sisi pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan sudah berujud dengan hasilnya berupa :

- a. Pasar Desa Garung untuk pasar sayuran, adapun pasar desa di Kejajar (belum jadi STA, akan ditingkatkan fungsinya).
- b. Pasar Desa di Selomerto dan Leksono untuk komoditas sayuran; sangat potensial untuk dikembangkan;
- c. STA sudah ada di Sempol Kecamatan Sukoharjo tetapi tidak fungsional karena mismanajemen dan strategi *positioning* yang kurang tepat; anggaran pembangunan selama tahun 2000 – 2006 banyak terserap di Kecamatan Sukoharjo.

Lokasi alternatif STA di Garung, Sukoharjo dan Tlogo (sentra sayur dan buah), serta Kejajar. Kelembagaan dan zonasi/penetapan lokasi perlu ditata mengingat STA di Sempol Sukoharjo yang sudah dibangun mangkrak, ada aroma KKN dalam pembangunannya dan tidak didukung aspirasi masyarakat yang luas hanya didukung kelompok tani tertentu. STA di kawasan Rojonoto (Kaliwiro, Sukoharjo, Leksono, dan Selomerto) dibuka hanya pada hari pasaran. Daerah

Kecamatan Kertek dan Kalikajar bisa menjadi lokasi alternatif Pasar Desa/STA daerah timur selatan Kabupaten Wonosobo dengan lokasi di Desa Kembaran. Saat ini di Desa Kembaran sudah ada kegiatan pasar desa, bisa ditingkatkan menjadi STA.

Keberadaan lembaga keuangan mikro pendukung pengembangan kawasan agropolitan sudah ada BRI dan BKK tetapi belum optimal pelayanannya dan tidak penuh inisiatif.

Terkait dengan program konservasi alam dan lahan abadi pertanian sudah ada program pengembangan hutan rakyat dan pengembangan kebun salak. Wonosobo dalam hal budidaya salak kalah unggul dari Banjarnegara, rasa buah salah dari Wonosobo lebih asam dan kenyal, rasa buah salak dari Banjarnegara lebih manis dan masir; karena lebih mampu mengolah, Wonosobo lebih dikenal sebagai daerah produsen olah buah salak (criping, manisan dan lain-lain).

Kegiatan usaha tani dengan keunggulan bersaing berupa budidaya *on farm* dan *off farm* salak, duren, pisang (di Kaliwiro), karika, purwoceng lokasi budidaya di luar kawasan Rojonoto, dengan lokasi pengolahan hasil budidaya di Wonosobo di daerah Kroyo Tengah. Kultur minatani dilakukan sambil lalu, terbatas dilakukan di Kecamatan Kertek dan Kaliwiro, pemasaran produk ke pasar lokal di Kota Wonosobo dan daerah Yogya serta Malang.

Pemanfaatan teknologi perdesaan berbasis pertanian dan kegiatan promosi diterapkan sebagai pendukung kegiatan produksi pertanian di kawasan agropolitan dan kegiatan agrobisnis berupa pameran buah segar dan bahan olahan. Pengembangan kawasan agropolitan bisa fungsional dan *misalokasi*, beban terberat ada pada dinas pertanian, sektor peternakan dan perkebunan perlu ditingkatkan peran sertanya.

Peningkatan fungsi dan koordinasi Pokja Agropolitan, refungsionalisasi kelembagaan sesuai dengan visi, misi dan komitmen pengembangan agropolitan. Butuh revitalisasi pokja, fasilitasi forum koordinasi dan dukungan dana untuk penelitian dan penyediaan kemudahan akses informasi serta distribusi data kegiatan agrobisnis.

## **6. Persepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan dari Bappeda Kabupaten Wonosobo**

*Master Plan* 2004 merupakan acuan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Wonosobo. Model perencanaan *top down* dan berbau KKN pelaksanaannya, sehingga menciptakan resiko mangkraknya program.

Sebagai bukti STA Sempol Kecamatan Sukoharjo mangkrak, hal itu terjadi karena :

- a. Penentuan lokasi yang tidak pas;
- b. Kelembagaan pengelola yang tidak siap;
- c. Pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan *trend setter*, bukan hasil pengkajian strategis bisnis;
- d. Ego sektoral;
- e. Produk yang dipasarkan bersifat musiman;
- f. Akses jalan yang ada memutar dari Sawangan ke Sempol ( $\pm 20$  km).

Di STA Sempol yang mangkrak ada 12 kios dengan luas fasilitas parkir  $\pm 1000$  m<sup>2</sup>, akses jalan baik dan ada listrik. Keberadaan STA ini tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari kelompok tani kawasan sekitar STA, dukungan hanya berasal dari kelompok tani 2 (dua) desa.

Pengembangan STA direncanakan ada di Sawangan Kecamatan Leksono rencana lokasi STA, basis hortikultura dan buah-buahan). Budidaya salak di Kecamatan Sukoharjo, Durian menyebar di wilayah Kecamatan Selomerto dan budidaya pisang di wilayah Kecamatan Kaliwiro yang sudah dicanangkan berupa pasar buah di Sempol Kecamatan Sukoharjo. Sawangan di rencanakan sebagai pasar sayur partai besar.

Dari hasil laporan terakhir tahun 2008 sudah nampak bahwa semua SKPD punya program ke agropolitan tetapi masih jalan sendiri-sendiri. Tupoksi pengelola kawasan agropolitan secara teknis dipegang oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Pengelola kawasan agropolitan secara kelembagaan diwadahi berupa Pokja dengan anggota Bagian Ekonomi Bappeda dan Dinas-dinas terkait). Belum berfungsi optimal, perlu revitalisasi pokja. Sosialisasi keberadaan dan peran sifatnya sektoral. Camat Garung Didit Wibawanto merupakan inisiator pengembangan agropolitan di Kabupaten Wonosobo serta Pak Hari dari Dinas Pertanian. Tahun 2008 ada bantuan program 2POA untuk pertanian tetapi APBD Kabupaten Wonosobo dirolling ke sektor lain. Sejak tahun 2005 – 2007 Pokja dipegang Dinas Pertanian.

Indikator pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif belum terdata. Secara kualitatif dalam kelompok tani ada peningkatan dalam usaha tani. Ada pelatihan keselamatan saat panen durian di Kecamatan Selomerto (Desa Krasak, Wediasin dan Wonolelo). Ada peningkatan SDM dan kegiatan *off-farm* produk pertanian disertai kegiatan promosi hasil pertanian saat hari jadi Kabupaten Wonosobo ditampilkan *stand* eksposisi Kawasan Agropolitan Rojonoto. Peningkatan potensi SDM kelompok tani dan wanita yg dilakukan antara lain berupa kegiatan

magang untuk kegiatan *off farm* (inovasi produk pembuatan kripik) di Balai Besar Diklat Agribisnis Hortikultura di Lembang.

Bidang Fisik dan Sarana Bappeda menjadi *leading sektor* karena beban koordinasi masih dalam penyusunan *master plan*. Pokja pengelola kawasan agropolitan butuh direvitalisasi (butuh SK payung baru untuk Pokja) dengan melibatkan para pihak yang mau terlibat aktif dalam pengembangan agropolitan.

Dinas pertanian kurang aktif. *Lead sektor* Dinas Kimpraswil kurang memberi ruang partisipasi dalam pengembangan STA, sehingga dukungan pengembangan agropolitan dari SKPD terkait kurang memadai.

Perlu disampaikan usulan kembali penataan kawasan agropolitan di Garung, secara realitas sudah ada kegiatan bisnis. Komoditas yang diperdagangkan adalah lombok, kubis, bunga krisan, kenci, loncang dan lain-lain. Jejaring pemasaran sekitar Kabupaten Wonosobo hingga Yogyakarta. Paling memadai sebagai lokasi STA adalah daerah Garung dan Kejajar, hanya butuh jalan penghubung dari Desa Tlogo ke Desa Kuripan (Kecamatan Garung).

Rencana pengembangan STA di Desa Kembaran lokasinya terisolir, *nyempal* dan jauh (aspirasi tokoh masyarakat). Kertek menjadi pasar sayur alternatif (tidak didisain formal). Petani memilih berjualan di Pasar Kertek berasal dari Kecamatan Dieng, Kepil, Sapuran Selomerto Bawah. Di Pasar Kertek ada fasilitas parkir dan dekat jalan raya. Kegiatan pasar sayur berlangsung dari jam 14.00 – 22.00. Ada lahan untuk pengembangan pasar sayur ± 1 km dari pasar Kertek. Lokasi ideal itu ada di Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar, terletak antara Kecamatan Kertek dan Kalikajar.



GAMBAR 7 :  
PETA PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN  
DI KABUPATEN WONOSOBO



1956

**B. TABEL 2 : EVALUASI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN ROJONOTO DI KABUPATEN WONOSOBO**

No.	KRITERIA	DESKRIPSI	Berbasis agribisnis (agroindustri, perdagangan dan jasa pelayanan).	Hubungan antara <i>central land</i> dan <i>hinterland</i> bersifat interdependensi *.	Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota.	Ada jejaring produksi dan pemasaran hasil pertanian dalam kawasan agropolitan.
1	Karakteristik Pengembangan Agropolitan		√	—	—	—
			Pemberdayaan Usaha Tani dan partisipasi masyarakat	Penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan agropolitan	Kerjasama regional yang bersifat lintas sektoral
2	Pengembangan ekonomi lokal		√	—	—	—
			Alternatif (Kebijakan Pengembangan ekonomi lokal)	Eksploitasi (Kebijakan dari atas)	Utopia (Kebijakan dari bawah)	
3	Kebijakan Pembangunan Wilayah		—	√	—	
			Akses terhadap lahan pertanian dan air	Kebijakan Mendukung Diversifikasi Produk Pertanian	Tidak tergantung sepenuhnya pada keputusan dari pemerintah pusat	Kekuatan komitmen koordinasi
4	Kunci Sukses Agropolitan		√	√	—	—
			Prinsip Kerakyatan	Prinsip Swadaya	Prinsip Kemitraan	Prinsip bertahap dan berkelanjutan
5	Sinergi pemberdayaan antara partisipasi masyarakat dan fasilitasi pemerintah		—	—	—	—

\* Catatan : Kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (on farm) dan produk skala rumah tangga (*off farm*), sedangkan kota menyediakan fasilitas seperti sarana, modal, teknologi, informasi, penampungan, pengolahan dan pemasaran.

Dari tabel 2 kita mendapatkan gambaran bahwa pengembangan Kawasan Agropolitan Rojonoto di Kabupaten Wonosobo menghasilkan temuan :

- a. Karakteristik Pengembangan Agropolitan hanya memenuhi aspek berbasis agribisnis (agroindustri, perdagangan dan jasa pelayanan) sangat minimalis. Hubungan antara *central land* dan *hinterland* yang bersifat interdependensi tidak terbangun, tidak adanya kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota serta tidak adanya jejaring produksi dan pemasaran hasil pertanian dalam kawasan agropolitan mengakibatkan kurang optimalnya hasil pengembangan kawasan agropolitan. Sangat disayangkan potensi SDA yang berlimpah dan SDM *stake holders* pengembangan Kawasan Agropolitan Rojonoto menjadi tidak terkelola dengan baik (*idle*).
- b. Pengembangan ekonomi lokal baru menyentuh aspek pemberdayaan Usaha Tani dan partisipasi masyarakat. Usaha penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan yang masih terbatas skala dan cakupannya mengakibatkan efek multiplikasi pengembangan agribisnis menjadi terbatas. Adapun aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan agropolitan serta pengembangan kerjasama regional yang bersifat lintas sektoral masih perlu diupayakan pengembangannya juga.
- c. Kebijakan pembangunan wilayah hanya menerapkan implementasi dan mengadopsi kebijakan dari atas, kurang memberi ruang bagi implementasi kebijakan alternatif berupa kebijakan pengembangan ekonomi lokal serta implementasi kebijakan dari bawah. Akibat kurang adanya inisiatif lokal ini

pengembangan kawasan agropolitan Rojonoto mengalami *stagnasi*.

- d. Kabupaten Wonosobo memiliki kunci sukses pengembangan agropolitan berupa akses terhadap lahan pertanian dan air serta adanya kebijakan mendukung diversifikasi produk pertanian. Akan tetapi disayangkan, situasi tidak tergantung sepenuhnya pada keputusan dari pemerintah pusat serta kekuatan komitmen koordinasi kurang dimiliki oleh para *stake holders* pengembangan kawasan agropolitan Rojonoto Kabupaten Wonosobo.
- e. Kabupaten Wonosobo sama sekali belum bisa mewujudkan sinergi pemberdayaan antara partisipasi masyarakat dan fasilitasi pemerintah. Penerapan prinsip kerakyatan, prinsip swadaya, penerapan prinsip kemitraan serta prinsip pemberdayaan yang bertahap dan berkelanjutan belum bisa diwujudkan.